BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dewasa ini masih menjadi masalah yang banyak dihadapi oleh berbagai negara. Kekerasan menjadi hal yang banyak ditujukan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, kekerasan terhadap kelompok minoritas ataupun etnis tertentu masih banyak dijumpai. Asia Tenggara pada dasarnya merupakan wilayah yang heterogen, dengan keragaman etnis, budaya dan agama yang sangat besar. Jenis minoritas di Asia Tenggara ini terbagi beberapa jenis yakni etnis minoritas, bahasa minoritas, agama minoritas, dan masyarakat adat.

Pada dasarnya etnis, bahasa dan agama minoritas merupakan satu kesatuan yang disebut juga sebagai etnis minoritas dan berbeda dengan masyarakat adat. Masyarakat adat didefinisikan sebagai masyarakat Asli atau penduduk yang awal yang menempati wilayah tersebut. Sedangkan etnis minoritas sendiri umumnya diartikan sebagai masyarakat yang memiliki identitas yang sama dengan negara lain yang tergolong sebagai pendatang di negara tersebut walaupun telah ada sejak ratusan tahun yang lalu (Clarke, 2001, hal. 415).

Namun, terkait hal tersebut di Asia tenggara sendiri terdapat perbedaan pandangan dimasing-masing negara dalam mendefinisikan etnis minoritas dan masyarakat adat. Di Filipina, etnis Muslim Moro dianggap sebagai etnis minoritas

dengan alasan mereka memiliki keterikatan dan identitas yang sama dengan muslim di Malaysia dan Indonesia. Tetapi di Vietnam, pemerintah negara ini tidak mengakui istilah masyarakat adat. Semua etnis selait etnis Kinh dianggap sebagai etnis minoritas walaupun pada nyatanya etnis lain seperti etnis Khmer telah menempati negara tersebut jauh sebelum etnis Kinh datang. (Clarke, 2001, hal. 415).

Sehingga kekerasan terhadap etnis minoritas dan diskriminasi terhadap masyarakat adat di beberapa negara di Asia Tenggara tidak dapat dihindari karena perbedaaan pandangan dalam masing-masing negara. Seperti kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar yang dianggap sebagai etnis minoritas dan bahkan tidak diakui sebagai warga negara Myanmar karena kesamaan identitas, budaya dan agama yang dimilikinya dengan etnis di Bangladesh. (Susetyo, Fitria, & Asyhari, 2016, hal. 23).

Masalah terkait kekerasan terhadap etnis minoritas juga terjadi di Malaysia. Negara yang tergolong sebagai negara yang cukup maju di Asia Tenggara ini merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam etnis ataupun suku, seperti etnis Melayu, Tionghoa dan India dianggap sebagai kelompok etnis mayoritas yang ada di Malaysia. Disamping itu, terdapat juga salah satu masyarakat adat atau penduduk Asli yang ada di tanah Malaysia disebut sebagai Orang Asli yang terdiri dari 3 kelompok atau kaum yang berjumlah sekitar 150 ribu Orang. Yakni Negrito (suku Kensiu, Kintak, Lanoh, Jahai, Mendriq dan Bateq), kaum Senoi (suku Che Wong, Mahmeri, Jahut, Semoq Beri, Semai dan Temiar) dan kaum Proto-Malay (suku Kuala, Kanaq, Seletar, Jakun, Semelai, Temuan). (Jabatan Kemajuan Orang Asli, 2016).

Terkait dengan pengakuan terhadap Orang Asli, istilah ‘Orang Asal’ digunakan pada tahun 1950an untuk mengakui keberadaan Orang Asli sebagai etnis ‘*Aborigin*’ yang ada di Malaysia dengan tujuan untuk mengambil hati Orang Asli agar tidak menjadi simpatisan dari kelompok komunis. (Subramaniam, 2015, hal. 73-74) Akan tetapi, Orang Asli Malaysia hanya diakui sebagai masyarakat adat dalam konstitusi negara Malaysia dan tidak termasuk dalam bumiputera atau pribumi. Padangan sebagai ‘orang hutan’ dan bukanlah etnis yang membangun pemerintahan negara Malaysia pertama kali menjadi alasan Orang Asli hanya dianggap sebagai masyarakat adat (Gomes, 2004, hal. 1).

Walaupun dianggap sebagai masyarakat adat atau *Indigenous People*, Orang Asli Malaysia pada kenyataannya mendapat perlakuan sebagai etnis minoritas. Sama seperti beberapa etnis minoritas lain yang mendapat kekerasan di negaranya masing-masing. Etnis Orang Asli ini juga telah mendapat perlakuan yang buruk sejak sebelum Malaysia Merdeka (Masron, Masami, & Ismail, 2007, hal. 76-77). Jumlah populasi Orang Asli yang sedikit ini menjadi salah satu alasan Orang Asli Malaysia menjadi kelompok minoritas seperti yang terjadi di beberapa negara seperti Australia dan di Amerika Latin, diskriminasi ataupun kekerasan banyak dilakukan terhadap suku-suku Asli di negara-negara tersebut.

Sebelum invasi Inggris, perbudakan dan pembunuhan terhadap Orang Asli dengan menjual dan memberikan Orang Asli kepada penguasa lokal untuk digunakan sebagai budak. Hal tersebut kemudian berhenti ketika Inggris datang, yang lebih menjadikan Orang Asli menjadi objek penelitian Antropologi dan masalah perbudakan terhadap Orang Asli mulai berakhir pada abad ke 20. Pada masa kolonial Inggris, ‘benteng hutan’ dibangun di wilayah pemukiman Orang

Asli sebagai fasilitas pendidikan dan kesehatan dan lainnya. Namun, ketika pemerintahan Malaysia diserahkan pada etnis Melayu, kebijakan asimilasi dan relokasi Orang Asli mulai gencar dilakukan untuk menghentikan pemberontakan yang dilakukan Orang Asli hingga menyebabkan ratusan orang dari etnis Orang Asli meninggal (Schertow, 2007).

Diskriminasi yang terjadi sejak pra dan pasca era kolonial nyatanya masih banyak terjadi. Kekeraasan yang terjadi bukan hanya kekerasan langsung tetapi juga seperti pengambilalihan lahan oleh pemerintah Malaysia, Asimilasi secara paksa dan lain sebagainya. Namun, juga muncuk kekerasan kultural yang sudah terlihat adanya sejak era Mahathir seperti adanya stereotip dan upaya Islamisasi. Hal tersebut terus berlanjut hingga era pemerintahan Badawi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, tulisan ini akan lebih fokus mengakaji mengenai kekerasan kultural yang dialami oleh etnis Orang Asli pada masa kepemimpinan Najib Razak. Sehingga pertanyaan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana bentuk kekerasan kultural yang terjadi dikalangan etnis Orang Asli pada era Najib Razak?

Untuk membantu penulisan penelitian ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan turunan yakni:

1. Bagaimana Kategorisasi Orang Asli di Malaysia?

2. Bagaimana Bentuk Kekerasan Kultural Terhadap Orang Asli Pada Era Mahathir dan Badawi?
3. Apa Yang Mendorong Terjadinya Kekerasan Kultural Pada Era Najib Razak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekerasan kultural yang dialami oleh etnis Orang Asli Malaysia pada era pemerintahan Najib Razak. Disamping itu untuk mengetahui bagaimana kekerasan kekerasan kultural tersebut pada akhirnya dapat terjadi dikalangan Orang Asli.

1.4 Signifikansi

Kekerasan terhadap etnis telah banyak terjadi di Asia tenggara, di Malaysia sendiri kekerasan dan diskriminasi etnis dialami oleh beberapa etnis minoritas. Dalam penelitian ini akan berfokus pada kekerasan kultural yang dialami oleh etnis Orang Asli Malaysia. Etnis Orang Asli yang merupakan kelompok masyarakat adat di negara Malaysia ini telah mengalami kekerasan yang cukup lama. Penelitian ini akan dilihat melalui kekerasan kultural Johan Galtung. Melalui konsep kekerasan kultural Galtung ini peneliti akan melihat bentuk-bentuk kekerasan berdasar aspek-aspek budaya yang menjadi instrumen kekerasan serta melihat bagaimana kekerasan kultural dapat terjadi melalui bentuk kekerasan struktural dan *direct* atau langsung.

Secara akademik, isu mengenai kekerasan kultural terhadap etnis Orang Asli Malaysia pada era Najib, merupakan penelitian yang belum diteliti sebelumnya. Disamping itu, secara praktik penelitian ini lebih bertujuan untuk memetakan konflik yang terjadi khususnya dalam hal kekerasan kultural terhadap Orang Asli Malaysia. Terkait dengan kekerasan terhadap etnis Orang Asli Malaysia, hal yang paling penting dalam penelitian ini adalah kekerasan kultural terhadap etnis Orang Asli Malaysia pada era pemerintahan Najib Razak. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada bentuk-bentuk kekerasan atau isu-isu kekerasan yang dialami oleh etnis Orang Asli tanpa adanya generalisasi pola kekerasan terhadap Orang Asli Malaysia dari masa ke masa.

Sehingga menarik untuk dilihat khusunya pada era pemerintahan Najib Razak seperti halnya masalah kekerasan kultural dalam aspek kesehatan dan pendidikan. Setelah kepemimpinan Mahathir dan Badawi pada kenyataanya kekerasan kultural terhadap Orang Asli sudah terlihat. Dan penulis menduga pada masa kepemimpinan Najib Razak berlangsung skala atau tingkat kekerasan kultural yang dialami oleh Orang Asli juga cukup tinggi. Dalam hal ini penulis melihat terdapat tiga alasan mengapa kekerasan kultural terhadap orang asli perlu dipelajari di era Najib Razak. Pertama yakni, menguatnya peran kelompok masyarakat sipil dalam masalah hak asasi manusia (U.S. Deparment of State, 2017). Kedua, demokratisasi dan peran oposisi lebih menguat (Alagappa, 2013), dan yang ketiga adalah karena narasi internasional dalam masalah HAM lebih menguat dan terbuka (International Institutions and Global Governance Program, 2012). Atas dasar tersebut, penulis memiliki asumsi bahwa, seharusnya kekerasan kultural terhadap Orang Asli di era Najib menjadi lebih berkurang.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian yang termasuk dalam Studi Konflik dan Perdamaian ini akan berfokus pada kekerasan kultural terhadap Orang Asli pada era pemerintahan Najib Razak. Penulis melihat pada era pemerintahan Najib Razak ini kekerasan terhadap Orang Asli masih banyak terjadi walaupun perdana menteri Malaysia telah berganti. Disamping itu, pasca kepemimpinan Mahathir dan Badawi kekerasan kultural terhadap Orang Asli mulai terjadi. Dan penulis menduga setelah kepemimpinan Najib Razak berlangsung skala atau tingkat kekerasan kultural yang dialami oleh Orang Asli menurun.

Kemudian bentuk-bentuk kekerasan kultural yang dialami Orang Asli Malaysia akan dilihat dari masa ke masa pada era pemerintahan Najib Razak untuk melihat perubahan dalam bentuk kekerasan yang dialami oleh Orang Asli Malaysia. Kekerasan kultural menjadi fokus peneliti karena kekerasan kultural merupakan bentuk kekerasan yang dapat menjadi penyebab kekerasan langsung dan struktural ataupun juga dapat menjadi pembenaran atau justifikasi atas terjadinya kekerasan langsung dan struktural. (Galtung, 1990, hal. 291).

1.6 Tinjauan Pustaka

Kekerasan terhadap kelompok agama minoritas atau etnis minoritas tertentu telah menjadi isu yang banyak dibahas oleh para peneliti. Di Asia Tenggara, kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas banyak terjadi di beberapa negara. Kikue Hamayotsu membahas mengenai diskriminasi terhadap penganut agama minoritas di Asia Tenggara. Hamayotsu mencontohkan penganut agama

Kristen di Indonesia mengalami kekerasan, intimidasi, diskriminasi dan intoleransi oleh sejak pertengahan tahun 2000. Ditahun 2009 kekerasan terhadap kelompok agama Kristen juga pernah terjadi di Malaysia akibat dugaan pelecehan agama terhadap agama Islam (Hamayotsu, 2015, hal. 7-11).

Disamping itu, Gerard Clarke mengatakan bahwa etnis minoritas dipandang sebagai kelompok asing karena keterikatannya akan budaya dan identitas Asli mereka. Oleh karenanya, banyak dari etnis minoritas di Asia Tenggara justru mendapatkan perlakuan kasar dan diskriminasi yang didukung oleh peran pemerintah yang berasal dari etnis mayoritas (Clarke, 2001, hal. 415-419). Salah satu kasus kekerasan yang dialami oleh etnis minoritas di Asia Tenggara dicontohkan oleh Heru Susetyo dan kawan-kawan, dalam tulisannya yang berjudul *Rohingya Stateless People And Nowhere To Go.* Heru menjelaskan bahwa kekerasan yang dialami oleh etnis rohingya di Myanmar sejatinya merupakan kejadian yang bersejarah. Etnis tersebut telah mengalami diskriminasi dan kekerasan bahkan sejak awal tebentuknya negara Myanmar (Susetyo, Fitria, & Asyhari, 2016, hal. 24-25).

Berbeda dengan kasus rohingya, Wijaya Herlambang dalam tulisannya yang berjudul Kekerasan Budaya Pasca 1965, membahas mengenai kasus kekerasan kultural di Indonesia terhadap kelompok komunis atau biasanya disebut Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam masalah ini pemerintah orde baru Indonesia menganggap bahwa kelompok tersebut sebagai kelompok pengkhianat dengan banyak menayangkan film propaganda G30S PKI untuk menyebarkan ideologi anti-komunisme (Herlambang, 2015, hal. 12-13).

Di Malaysia sendiri, kekerasan dan diskriminasi terhadap etnis tertentu telah banyak terjadi. Dalam laporan yang ditulis oleh Pusat Komas Malaysia mengenai *Malaysia Racial Discrimination Report 2015*, diskriminasi etnis dalam bidang kesehatan, tenaga kerjam pendidikan dan lainnya telah mengalami peningkatan ditahun 2015. Hal ini diakibatkan oleh adanya praktik budaya politik rasial yang terjadi sejak tahun 1957. Dalam laporan ini juga dikatakan bahwa etnis Orang Asli Malaysia menjadi korban dari diskriminasi tersebut (Pusat Komas Malaysia, 2015, hal. 7-11). Dalam jurnal *Violence, Fear and Anti-Violence: The Batek of Penisular Malaysia,* kekerasan baik itu secar kultural, struktural ataupun langsung telah dirasakan oleh Orang Asli ini sejak zaman dahulu ketika etnis Melayu mulai menempati wilayah semenanjung Malaysia.

Ivan Tacey dan Diana Riboli menuliskan bahwa ‘pengambilalihan kekuasaan’ yang diakukan oleh kelompok non-Orang Asli di Malaysia semakin meningkat seletah Malaysia mendapatkan kemerdekannya. Suku Batek yang merupakan suku terbesar dalam etnis Orang Asli mulai banyak kehilangan lahannya ketika tahun 1970an. Kekerasan yang dialami oleh Orang Asli pada masa ini lebih kedalam konteks kekerasan struktural. Kontrol pemerintah terkait transformasi lahan dan pembangunan negara dijadikan sebagai alasan oleh pemerintah yang berasal dari non-Orang Asli sebagai upaya mengambil alih lahan yang berakibat ketidak merataan antara Orang Asli dan non-Orang Asli terkait kepemilikan lahan (Tacey & Riboli, 2014, hal. 206-209).

Hal tersebut juga muncul karena anggapan pemimpin Tunku Abdurrahman yang mengatakan bahwa etnis Melayu lah yang merupakan etnis pribumi Malaysia, karena orang Asli sendiri dianggap sebagai etnis yang tidak memiliki

peradaban dan hidup di hutan. Hal ini juga didukung hingga kepemimpinan Mahathir, dimana ia menyatakan bahwa orang pribumi merupakan orang yang membangun pemerintahan pertama kali di wilayah tersebut yakni etnis Melayu seperti yang ditulis Alberto G Gomes dalam *The Orang Asli of Malaysia*, (Gomes, 2004, hal. 1).

Andrew McGregor juga megatakan pengambilalihan lahan dilakukan dengan alasan untuk kebaikan masyarakat seperti anggapan bahwa etnis Penan di Sarawak tidak hidup layaknya manusia jika tidak direlokasi ke lokasi yang lebih baik (McGregor, 2008, hal. 187). Jamalunlaili Abdullah dan kawan-kawan juga mengatakan bahwa memang indikasi kekerasan struktural yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap Orang Asli terlihat dalam kebijakan *resettlement* atau relokasi suku-suku orang Asli dari wilayah asalnya ke wilayah yang lebih modern.

Kebijakan yang diadopsi dari *Federal Land Development Authority* (FELDA) dengan mengelompokan orang-orang Asli dalam suatu wilayah yang lebih kecil guna mendapatkan fasilitas pengembangan dan pembangunan yang lebih mudah. Walaupun pada dasarnya dari 45 orang responden, sebanyak 38 persen menyatakan bahwa kehidupannya yang baru ini justru semakin memperburuk keadaaan walaupun 33 persen lainnya menyatakan lebih baik. Buruknya keadaan dikarenakan minimnya pendidikan utnuk mendapat pekerjaan yang baik tetapi biaya kebutuhan justru cukup tinggi. Namun, bagaimanapun mayoritas dari mereka sendiri tidak memiliki pilihan untuk meninggalkan tempat tersebut karena tidak memiliki tujuan lain untuk ditinggali. (Abdullah, Borhan, & Ahmad, 2015, hal. 73-77).

Dalam buku yang berjudul ‘Orang Asli’, Colin Nicholas juga menuliskan bahwa secara hukum nasional Malaysia, hak atas lahan yang digunakan Orang Asli ini hanya sebatas pengguna atau penyewa lahan. Pemerintah Malaysia secara hukum berhak mencabut atau mengambil alih lahan yang digunakan orang Asli untuk kepentingan nasional. Hal ini terlihat pada akhir 2003 dari total lahan 127.698,54 hektar hanya 644,17 hektar lahan yang diakui secara sah sebagai lahan milik orang Asli. Disamping itu, klaim atas tanah orang Asli ini juga banyak dilakukan berbagai pihak baik itu domestik ataupun internasional dikarenakan tidak adanya ketetapan hukum atas tanah orang Asli. Sehingga hal tersebut berakibat dengan banyaknya kemiskinan karena akses dalam penggunaan sumberdaya Orang Asli ini menjadi sangat terbatas (Nicholas, 2010, hal. 22-24).

Hal tersebut juga muncul karena anggapan perdana menteri saat itu yakni Tunku Abdurrahman yang mengatakan bahwa etnis Melayu lah yang merupakan etnis pribumi Malaysia, karena orang Asli sendiri dianggap sebagai etnis yang tidak memiliki peradaban dan hidup di hutan. Hal ini juga didukung hingga kepemimpinan Mahathir, dimana ia menyatakan bahwa orang pribumi merupakan orang yang membangun pemerintahan pertama kali di wilayah tersebut yakni etnis Melayu seperti yang ditulis Alberto G Gomes dalam *The Orang Asli of Malaysia*, (Gomes, 2004, hal. 1).

Dalam kasus lain, Toshihiro juga mengatakan diskriminasi terjadi melalui upaya Islamisasi yang dilakukan terhadap Orang Asli. Masuk kedalam ajaran Islam memberikan banyak keuntungan bagi Orang Asli, seperti diakui sebagai orang Melayu, diberi rumah dan uang sebesar 5 juta rupiah perbulan dan lainnya. Tetapi kebijakan yang berlangsung sejak tahun 1974 dianggap juga sebagai

kebijakan 'diskriminasi positif' karena hal ini menunjukan bahwa memang jika orang Asli memeluk agama Islam maka mereka mendapatkan hak yang sama dengan etnis Melayu lainnya tetapi orang Asli non-muslim tentu tidak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan bantuan dan dukungan dari pemerintah Malaysia (Nobuta, 2007, hal. 486-490).

Selain kasus Islamisasi, Colin Nicholas dalam tulisannya yang berjudul Orang Asli, mengatakan bahwa etnis ini juga sering dijadikan sebagai kambing hitam oleh berbagai kelompok atas terjadinya suatu masalah yang menimpa orang Asli itu sendiri. Seperti pada tahun 2004, beberapa anak dari orang Asli yang tinggal disekitar danau Tasik Chini meninggal akibat keracunan bakteri salmonella yang diakibatkan oleh dibuatnya bendungan di Sungai Chini untuk mencegah air danau mengalir ke Sungai Pahang. Selain itu juga hal tersebut semakin parah karena pembuangan limbah oleh sebuah resor lokal di tepi danau. Tetapi pemerintah Malaysia justru mengomentari pola hidup orang Asli yang dinilai kurang menjaga kebersihan sehingga, pemerintah sendiri berupaya melakukan relokasi dengan alasan agar Orang Asli mendapatkan fasilitas yang baik dan hidup dengan bersih (Nicholas, 2010, hal. 44).

Heng Leng Chee dan Simon Barraclough dalam tulisan *Health Care in Malaysia: The Dynamics of Provision, Financing and Access* juga mengatakan bahwasannya perlakuan yang diskriminatif juga terjadi dalam aspek kesehatan seperti diskriminasi di rumah sakit. Banyak dari Orang Asli merasa enggan untuk pergi ke rumah sakit dikarenakan mereka cenderung tidak dihormati, kurang diperlakukan dengan baik atau dengan kata lain mereka cenderung diperlakukan secara diskriminatif. Bahkan hal tersebut juga terjadi dilingkungan sekolah,

hingga tahun 2004, banyak anak-anak Orang Asli memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah dikarenakan sikap beberapa guru yang sering memarahi anak-anak tersebut, disamping memang motivasi untuk belajar dikalangan Orang Asli juga sangat minim (Chee & Barraclough, 2007, hal. 131).

Berbeda dari tulisan-tulisan dalam kajian pustaka diatas yang lebih berfokus pada bentuk-bentuk dan isu-isu kekerasan yang dialami etnis Orang Asli Malaysia tanpa adanya pola dalam masa ke masa, penelitian ini akan melangkapi penelitian-penelitian sebelumnya serta lebih berfokus pada tinjauan terkait kekerasan kultural yang dialami oleh Orang Asli di Malaysia. Penulis kali ini akan meninjau dan menganalisis bagaimana kekerasan kultural terhadap Orang Asli Malaysia dapat terjadi atau masih terus terjadi dari tahun 2009 yakni pada masa pemerintahan Najib Razak.

1.7 Landasan Konseptual

Konsep Kekerasan Kultural

Dalam konsep kekerasan kultural Johan Galtung pada tulisannya yang berjudul *Cultural Violence, (Journal of Peace Research 1990)*. Budaya atau kultural dalam hal ini bukanlah entitas atau sistem kultur secara keseluruhan melainkan hanya aspek-aspek dalam budaya. Aspek simbolis dalam masyarakat seperti agama, ideologi, bahasa, seni, ilmu pengetahuan empiris dan ilmu formal dapat digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural.

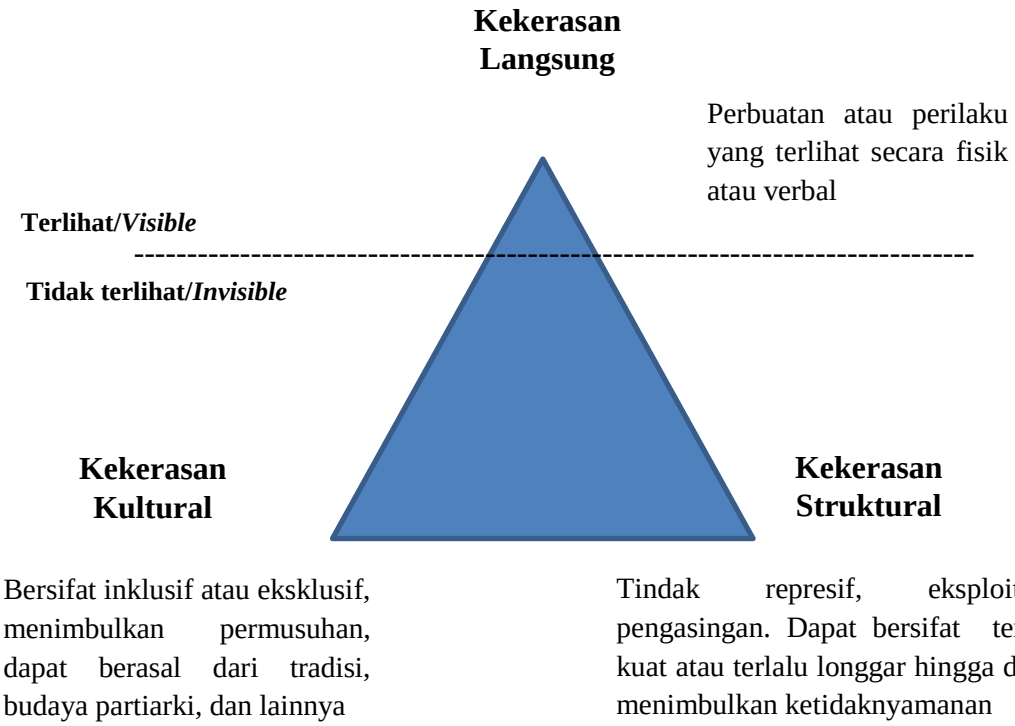
Kekerasan kultural, pada dasarnya membuat kekerasan langsung dan struktural menjadi terlihat benar atau bukanlah suatu kesalahan dalam melakukan

kekerasan dilingkungan masyakat. Menurut Galtung salah satu cara terjadinya kekerasan kultural ini yakni dengan mengubah warna atau pola dalam suatu tindakan dari sesuatu yang salah atau merah menjadi hal benar atau hijau. Selain itu juga dapat dengan cara menyamarkan suatu kenyataan sehingga tindak kekerasan atau fakta yang sebenarnya atas kekerasan tersebut menjadi tidak terlihat. (Galtung, 1990, hal. 291)

Disamping itu, Galtung juga menjelaskan bahwasannya kekerasan kultural sendiri dapat dipengaruhi, berasal atau berhubungan dengan kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Klasifikasi kekerasan langsung sendiri terdapat dalam empat kategori. Dalam kategori pertama yakni pembunuhan, melukai atau menghilangkan nyawa serta memberikan ancaman terhadap kehidupan seseorang. Kategori kedua yakni penderitaan atau hilangnya kesejahteraan sebagai ancaman dari adanya boikot atau sanksi, yang menimbulkan hilangnya kebebasan dan kesejahteraan dan dianggap sebagai pembunuhan secara perlahan oleh korban.

Kategori selanjutnya yakni pengasingan dalam aspek sosialisasi yang diartikan sebagai internalisasi budaya seperti halnya larangan penggunaan bahasa. Kategori terakhir yakni jenis kekerasan seperti penahanan, yang berarti mengunci orang di penjara serta pengusiran, yang berarti mengunci orang keluar (membuangnya ke luar negeri atau ke tempat-tempat yang jauh di negara ini). Kemudian, kekerasan struktural struktural sendiri merupakan segala bentuk represi dan eksploitasi yang dilakukan oleh aktor yang memiliki otoritas. Terdapat empat bagian dalam eksploitasi, yakni penetrasi, segmentasi, marginalisasi dan fragmentasi (Galtung, 1990, hal. 292-294).

Galtung menggambarkan hubungan ketiga kekerasan ini sebagai segitiga kekerasan dalam suatu strata atau tingkat kekerasan.



Gambar 1.1 Segitiga Kekerasan Galtung (Galtung, 1990, hal. 294)

Dalam segitiga kekerasan diatas dapat dilihat bahwasannya kekerasan kultural dan struktural berada dalam katergori kekerasan yang tidak terlihat sedangkan kekerasan langsung lebih terlihat. Dilihat dari sifat kekerasan kultural, hal tersebut tentu pada akhirnya dapat menjadi kekerasan langsung ataupun struktural ketika kekerasan kultural ini terus berkembang dalam lingkungan masyarakat.

Menurut Galtung, dalam segitiga tersebut kekerasan langsung diartikan sebagai sebuah peristiwa, kekerasan struktural sebagai proses pasang surut serta Kekerasan kultural sebagai hal yang tetap atau invarian. Pada umumnya, dalam hubungan atau aliran ketiga kekerasan ini ajaran budaya, nasihat dalam budaya,

hasutan, serta desakan telah menjadikan eksploitasi ataupun represi menjadi hal yang tak terlihat ataupun menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Kemudian setelah hal tersebut semakin memuncak, kekerasan langsung akan hadir sebagai upaya terakhir sebagai alasan untuk menyelesaikan masalah (Galtung, 1990, hal. 294).

Galtung juga menjelaskan bahwa bentuk utama kekerasan budaya yang dilakukan oleh elite yang berkuasa adalah dengan menyalahkan korban kekerasan struktural yang memulai masalah terlebih dahulu atau ‘orang yang melempar batu pertama’, dan menjadikannya sebagai 'penyerang'. Siklus dalam segitiga kekerasan ini bisa dimulai dari arah kekerasan manapun. Dalam aplikasi studi kasus pada penelitian ini, akar yang mendorong terjadinya kekerasan kultural, dapat dilihat melalui sudut pandang kekerasan struktural ataupun kekerasan langsung.

Untuk melihat bagaimana bentuk kekerasan kultural yang terjadi pada Orang Asli Malaysia penulis juga mengambil beberapa contoh yang menjadi kategori kekerasan kultural menurut Galtung. Pertama yakni agama, dalam hal ini ajaran agama Galtung menjelaskan bahwa pada dasarnya ajaran atau doktrin agama bisa digunakan untuk hal yang benar ataupun salah. Dalam analoginya ini, hal baik berasal dari tuhan sedangkan hal yang salah berasal dari ‘setan’. Dapat dipahami juga bahwasannya ketika doktrin agama diterapkan dalam jalan yang salah maka hal tersebut termasuk dalam kekerasan kultural. Begitu pula dengan contoh kedua yakni ideologi, dalam hal ini juga memberikan pengaruh atas dasar persepsi atau pandangan manusia. Dalam ideologi sebuah negara sendiri, hal itu dapat dipengaruhi oleh mayoritas ajaran agama di negara tersebut. Galtung

menjelaskan bahwa terkadang negara dipandang sebagai perpanjangan tangan tuhan yang memiliki kendali dalam menciptakan kehidupan. (Galtung, 1990, hal. 296-299)

Kemudian contoh ketiga yakni bahasa, dalam hal ini bahasa dapat menjadi unsur kekerasan budaya ketika bahasa sendiri digunakan untuk mendiskriminasi atau berprasangka terhadap kelompok tertentu melalui kata yang diucapkan. Kemudian, contoh selanjutnya adalah seni, menurut Galtung pada dasarnya seni sendiri dapat menjadi objek kekerasan ketika kerya seni tersebut menggambarkan kelompok tertentu dalam konteks negatif. Dalam contoh ilmu formal, secara garis besar Galtung menjelaskan bahwa hal tersebut berdasar pada penarikan kesimpulan secara logis. Dalam menarik kesimpulan secara logis tentunya seseorang dapat salah karena, dalam suatu persamaan tidak selamanya hal tersebut akan berakhir sama. Contoh terakhir yakni kosmologi, dalam hal ini aspek budaya yang telah dicontohkan oleh Galtung dilihat dari asal mula atau akar kemunculan hal tersebut. Konsep kosmologi juga dirancang untuk memandang hal yang lebih jauh akan kenyataan serta menentukan apa yang normal dan alami. (Galtung, 1990, hal. 296-301).

Jika dilihat dari penjelasan diatas, maka konsep ini dapat secara tepat menjelaskan mengapa kekerasan yang terjadi terhadap Orang Asli dapat disebut sebagai kekerasan kultural. Hal ini sesuai dengan penjelasan Galtung yakni bagaimana sebuah entitas budaya di lingkungan masyarat dapat menjadi hal yanng membenarkan tindak kekerasan langsung dan struktural terhadap Orang Asli. Beberapa kategori kekerasan kultural diatas juga dapat digunakan untuk menjelaskan bentuk kekerasan kultural terhadap orang Asli pada era pemerintahan

Najib Razak. Seperti kasus Islamisasi terhadap Orang Asli yang masuk dalam kategori kekerasan kultural melalui doktrin agama, kemudian menganggap asal-usul orang Asli sebagai kelompok ‘terbelakang’, ‘bodoh’ yang termasuk dalam kekerasan kultural yang melihat pada kosmologi Orang Asli. Serta menyimpulkan seluru Orang Asli memiliki kebiasaan, sikap, gaya hidup, dan pola pikir yang sama merupakan cara penyimpulan yang salah dalam kategori ilmu formal.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang memiliki tujuan baik praktis maupun teoritis secara terencana, terstruktur, dan sistematis. Selain itu metode penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan melalui prosedur ilmiah untuk dapat menjawab permasalahan yang terjadi (Bakry, 2016, hal. 7).

Metode penelitian kualitatif sendiri didefinisikan sebagai metode atau cara yang digunakan untuk mengeksplorasi suatu permasalahan. Penemuan ini didapatkan tidak melalui metode pertanyaan secara terperinci serta pengukuran atau kuantifikasi (Semiawan, 2010, hal. 6-7). Dalam pandangan Umar Suryadi Bakry, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman dan makna. Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai metode yang sistematis dan intuitif untuk menghasilkan penelitian yang koheren dan efisien (Bakry, 2016, hal. 62).

2. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk kekerasan budaya yang dialami oleh etnis Orang Asli Malaysia pada era pemerintahan Najib Razak. Serta faktor yang menyebabkan kekerasan kultural terhadap Orang Asli Malaysia pada era pemerintahan Najib Razak.

3. Alat Pengumpulan Data

Terkait sumber data yang akan ditelusuri, dalam teknik ini sumber data yang digunakan adalah metode pengambilan data sekunder. Penelitian sekunder sendiri dilakukan melalui penelusuran dalam tulisan-tulisan ilmiah atau artikel, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan topik pembahasan (Sugiyono, 2006, hal. 225) Data sekunder ini dapat didefinisikan sebagai data atau tulisan yang berupa laporan dari penelitian orang lain di mana diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan dokumen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini untuk memperoleh data penulis akan melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi melalui hasil penelitian sebelumnya dalam bentu jurnal, buku, dokumen dari website, media berita online berbahasa inggris dan Melayu, buletin, majalah serta laporan atau briefing dari berbagai instansi dan organisasi internasional.

Dalam penilitian ini, penulis juga akan menggunakan metode pengambilan data primer. Berbeda dengan penelitian sekunder, proses pengambilan data dalam metode ini dilakukan secara langsung dilapangan (Hs, 2007, hal. 248). Untuk memperoleh data dilapangan penulis akan melakukan wawancara dengan instansi atau organisasi terkait dengan Orang Asli Malaysia. Diantaranya adalah dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA), Center for Orang Asli Concern (COAC) serta Pusat Komas Malaysia.

4. Proses penelitian

Proses penelitian ini terdiri dari beberapa tahap menurut John W.Cresswell dalam tulisan Semiawan, metode penelitian juga diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara bertahap yang diawali dari identifikasi masalah, kemudian kajian pustaka, analisis data, setelah itu melakukan interpretasi dari data yang diperoleh dan terkahir adalah melaporkan hasil penelitian (Semiawan, 2010, hal. 5-6).

Selain itu, menurut W. Gulo beberapa proses dalam penelitian terdiri dari konseptualisasi masalah mengenai masalah yang dipertanyakan dalam penelitian, kemudian menentukan kerangka dasar, konsep atau teori yang akan mendukung dan memperkuat hasil dari penelitian. Setelah itu melakukan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data yang telah didapatkan. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisa terkait dengan permasalahan yang didapatkan hingga memperoleh hasil dalam penelitian kemudian setelah itu melakukan interpretasi atau melaporkan hasil dari penelitian tersebut. (Gulo, 2002, hal. 27-30).